



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA )Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA )Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu ini adalah amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA )Tahun 2024 dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga.

Rencana Kerja (RENJA )Tahun 2024 ini merupakan rencana aksi dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan, sekaligus sebagai Akuntabilitas dalam Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan merupakan Implementasi dari program/kegiatan pusat dan daerah.

Kami menyadari bahwa, dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA )Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kiranya saran, masukan dan rekomendasi konstruktif dari semua pihak sangatlah kami perlukan guna melengkapi kekurangan untuk penyempurnaan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu

**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640601 199103 2 002

DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Cover</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1    Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..	12
2.4    Rancangan Awal RKPD.....	12
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.3    Rencana Program dan Kegiatan.....	29
3.4    Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.....	40
<b>BAB IV     PENUTUP</b> .....	<b>47</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Tahun (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu.....	07
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Bengkulu.....	13
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Provinsi Bengkulu .....	41

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setra Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2024, yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta Review dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Review Tahun 2022 yang disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 juga merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Rev-2 Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
  15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dan hasil Rakorbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- b. Menjadikan Renja sebagai acuan dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
- c. Sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Perindustrian dan Perdagangan dalam memadukan kegiatan – kegiatan Pengembangan Industri dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu dan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak – pihak lainnya dalam mengambil keputusan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta indikator kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan
- b. Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
- c. Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- d. Bab IV. Penutup

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Program/(Outcomes)/Kegiatan Output.

Evaluasi RENJA dari masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA dititik beratkan pada pencapaian realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Tahun 2021 s/d Tahun 2026.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Pada Renja ini dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2023.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
s/d Tahun 2026 (Tahun Berjalan) Provinsi Bengkulu**

**OPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Program RENSTRA-0 2026
1	2	3	4	5
3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Teknis Pelayanan Administrasi Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan</b>	100
3.30.01.1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	2
3.30.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1
3.30.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	16
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	



3.30.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara</b>	<b>Unit</b>	15
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	15
<b>3.30.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar</b>	<b>Persen</b>	<b>35</b>
<b>3.30.03.1.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	<b>Jumlah Pusat Distribusi Provisis yang dibangun dan di Kelola</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	4
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	4
<b>3.30.04</b>	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Kooefisien Kestabilan Harga</b>	<b>Persen</b>	<b>3,6</b>
<b>3.30.04.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas</b>	<b>Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting</b>	<b>Dokumen</b>	<b>37</b>
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	10
				37



<b>3.30.06.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk</b>	<b>Produk</b>	26
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	118
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	22
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	8
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	25
<b>3.30.05</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Jumlah Komuditi Ekspor</b>	<b>Produk</b>	16
<b>3.30.05.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang</b>	<b>Dokumen</b>	15
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	20
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	8
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	6
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	70
<b>3.31.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan</b>	<b>Persen</b>	100



<b>3.31.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>1</b>
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18
<b>3.31.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>32</b>
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	335
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
<b>3.31.01.1.07</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>16</b>
		<i>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU</i>		14

<b>3.31.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	140
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4
<b>3.31.02</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar</b>	<b>Persen</b>	33,46
		<b>Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Persen</b>	15,5
<b>3.31.02.10.1</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Dok</b>	1
		<b>Jumlah Unit Usaha Baru IKM</b>	<b>Unit</b>	100
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dok	12
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dok	6
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dok	19
<b>3.31.03</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi Industri</b>	<b>Rupiah (Milyar)</b>	336
<b>3.31.03.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan</b>	<b>Dokumen</b>	4



Berdasarkan tabel 2.1 maka dapat diketahui program kegiatan yang berhasil memenuhi target dan belum memenuhi target sampai dengan tahun 2023.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah mempunyai tolak ukur dan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kepala OPD sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dapat diketahui bahwa OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengurus urusan pilihan di urusan bidang industri, bukan di bidang urusan wajib seperti OPD DINas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Jadi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu tidak memiliki standar pelayanan minimal (SPM).

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hasil kinerja pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu terhadap semua stakeholder seperti tersebut di subbab Analisis Kinerja Pelayanan OPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinas Perindustrian dan Perdagangan Bekerja Berdasarkan Resntar dan renja yang telah di tetapkan dan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum menyampai target pada tahun berjalan.

## 2.4. Rancangan Awal RKPD

RKPD telah memuat program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan mengacu pada visi dan misi serta pencapaian tahun 2023. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan OPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyessuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu setelah melakukan analisis terhadap Rancangan Awal Renja RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal Renja Dinas perindustrian dan perdagangan Povinsi Bengkulu.

Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.2 dan Berikut di Bawah ini :

Tabel 2.2

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Bengkulu

OPD : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Anggaran 2024		Unit Kerja	Misi Ke dan Program Unggulan Ke
					Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2		3	4	7	8	14	16
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH					14.725.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2,4	825.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.01.1.06	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	9.500	825.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( UPTD PPMB )	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perdagangan yang di laksanakan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bidang Perdagangan yang di laksanakan	Persentase	100	94.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	4	44.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	15.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen		25.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	2	25.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	2	15.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	10.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	4	10.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1

3.30.03	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Sarana Distribusi Perdagangan Sesuai Standar</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Program Prioritas</b>
3.30.03.1.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>	<b>Jumlah Sarana Pusat Distribusi Provisnis yang dibangun dan di Kelola</b>	<b>Jumlah Pusat Distribusi Provisnis yang dibangun dan di Kelola</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Program Prioritas</b>
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	100.000.000	Perindag	Program Prioritas
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	50.000.000	Perindag	Program Prioritas
3.30.04	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Koefisien Kestabilan Harga</b>	<b>Persen</b>	<b>4</b>	<b>265.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.04.1.02	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>Infomasi harga dan stok Bapokting</b>	<b>Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>240.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang pentingf pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	40.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	10	200.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.04.1.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingka Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wiayah Kerjanya</b>	<b>Infomasi Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</b>	<b>Jumlah infomasi Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi</b>	<b>Dokumen</b>		<b>25.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersusidi dan Pestisida	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	1	25.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.06	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan</b>	<b>Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>160.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
		<b>Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang</b>	<b>Persen</b>	<b>87</b>		<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.06.1.03	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku</b>	<b>Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku</b>	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	10	60.000.000	Perindag	Misi Ke 1

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	6	100.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/Persyaratan Teknis yang Berlaku	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	5	40.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	5	20.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1	40.000.000	UPTD PPMB	Misi Ke 1
B.2	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Persentase dan Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	US \$ (Juta)	275		Perindag	Misi Ke 1
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	12,2		Perindag	Misi Ke 1
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Jumlah Komoditi Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	Produk	8	250.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang	Dokumen	4	250.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	4	125.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	2	25.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	20	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3,31	TUJUAN 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Persen	3,4	13.900.000.000	Perindag	Misi Ke 1
A.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	AKUNTABILITAS KINERJA OPD	NILAI SAKIP	Nilai	BB	12.759.500.000	Perindag	Misi Ke 1
3,1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD		NILAI SAKIP				Perindag	Misi Ke 1
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yanbidang Perindustrian dan Perdagangan yangg di laksanakan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yanbidang Perindustrian dan Perdagangan yangg di laksanakan	Persen	100	12.759.500.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	14	176.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	125.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	51.000.000	Perindag	Misi Ke 1

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.31.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14</b>	<b>9.978.461.897</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Bulan</b>	12	9.916.879.897	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	61.582.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03	<b>Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>38.850.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	38.850.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>1</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN	Paket	1	75.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	35.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>8</b>	<b>565.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	80.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	70.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	220.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.07	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>437.152.103</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	357.152.103	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		Perindag	Misi Ke 1
<b>3.31.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>1.225.036.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	20.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35	995.036.000	Perindag	Misi Ke 1
<b>3.31.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>30</b>	<b>135.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakajnya	Unit	9	110.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	25.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		Perindag	Misi Ke 1
<b>3.31</b>	<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI</b>	<b>NILAI PRODUKSI INDUSTRI</b>	<b>Nilai Produksi Industri Besar</b>	<b>Rupiah (Milyar)</b>	<b>11.700</b>	<b>1.140.500.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
			<b>Nilai Produksi Industri Kecil Menengah</b>	<b>Rupiah (Milyar)</b>	<b>250</b>		<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
<b>3.31.02</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar</b>	<b>Persen</b>	<b>11.1</b>	<b>1.015.500.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
			<b>Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
<b>3.31.02.10.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1.015.500.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
			<b>Jumlah Unit Usaha Baru IKM</b>	<b>Unit</b>	<b>120</b>		<b>Perindag</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	100.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	0	25.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	5	890.500.000	Perindag	Misi Ke 1

3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tersedianya Dokumen Nilai Realisasi Investasi Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	126,00	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	Dokumen	1	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terpantaunya Perusahaan Industri Dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen	1	75.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	75.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	3	50.000.000	Perindag	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis ndustri Provinsi Melalui SIINas	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	25.000.000	Perindag	Misi Ke 1
<b>Jumlah</b>						<b>14.725.000.000</b>		

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional****3.1.1 Telahaan terhadap RPJP Provinsi Bengkulu 2005 – 2025**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025, sektor industri merupakan motor penggerak terwujudnya perekonomian yang berdaya saing tinggi. Untuk itu pengembangan industri berbasis sumber daya yang mengolah secara efisien dan rasional kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan daya dukung dan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (industrial cluster) sebagai fondasinya harus dicapai serta pada akhirnya sektor perindustrian harus menjadi basis aktivitas ekonomi.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi, arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1) **Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Makro**

Upaya-upaya menuju sistem perekonomian berbasis keunggulan kompetitif dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai SDA dan unggulan daerah.

Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak pembangunan yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi secara efisien, modern dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Perdagangan diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan: (a) berkembangnya kelembagaan perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga terjangkau.

2) Revitalisasi Pertanian

Sektor perindustrian berbasis pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi. Agroindustri menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Bengkulu

3) Meningkatkan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Meningkatnya peranan ekonomi kerakyatan sebagai komponen utama pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Peranan UMKM perlu ditingkatkan agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat basis ekonomi daerah.

Pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK, dan berdaya saing. Untuk itu pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan UMKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan meningkatkan kualitas SDM. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM perlu diberi kemudahan akses terhadap lembaga-lembaga permodalan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

4) Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadikan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai pedoman umum kebijakan daerah kesejahteraan masyarakat dengan fokus kajian pada agribisnis dan agroindustri sebagai lokomotif pembangunan. Dunia usaha perlu dilibatkan dalam pembangunan IPTEK agar produk-produk riset dapat dikembangkan menjadi industri-industri yang berdaya saing tinggi.

5) Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based Industries*)

Dukungan dan pengembangan industri berbasis sumber daya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri yang bermuara pada terciptanya sistem ekonomi biaya rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, perlu membangun fondasi kegiatannya dengan menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat dengan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu :

1. pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
2. Penguatan hubungan antar-industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan
3. Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang antara lain meliputi sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas (*Metrology, Standardization, Testing and Quality/MSTQ*), serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri.

Pembangunan industri berbasis sumber daya diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*good corporate governance*)

Pengembangan industri yang berbasis SDA diarahkan pada upaya mengembangkan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA agar mampu meningkatkan nilai tambah, termasuk untuk meningkatkan daya saing dalam merebut pasar global.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat

bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dan investasi SDM.

6) Pengembangan Wilayah

Selama kurun waktu 20 tahun ke depan industri rakyat diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan. Industri rakyat yang dikembangkan hendaknya berbasis pada potensi sumber daya lokal yang terdapat di setiap kabupaten dan kota. Berikut ini diuraikan alternatif pengembangan industri rakyat di masing-masing kabupaten dan kota yaitu :

**a. Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu dapat berperan dalam pengembangan SDM melalui sektor pendidikan. Program Bengkulu kota pelajar dapat ditumbuhkembangkan secara lebih nyata selama 20 tahun ke depan sehingga mampu menyediakan SDM yang memiliki kompetensi tinggi. Kompetensi SDM yang diinginkan meliputi kecerdasan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, baik oleh pemerintahan, swasta maupun industri, serta kecerdasan kewirausahaan agar mampu menciptakan lapangan kerja baru. Posisinya sebagai ibukota provinsi sangat strategis dalam menjembatani sentra-sentra produksi yang berada di kabupaten dengan jaringan pasar yang ada di dalam dan luar negeri. Produk-produk dari daerah lain dapat diolah terlebih dahulu oleh industri-industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga, sebelum dipasarkan.

**b. Kabupaten Bengkulu Utara**

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi perkebunan yang sangat signifikan untuk dijadikan penggerak utama pembangunan. Dua komoditi yang paling dominan diusahakan di daerah ini adalah karet dan kelapa sawit.

**c. Kabupaten Muko Muko**

Kabupaten Muko Muko memiliki potensi yang relatif sama dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Daerah ini juga dapat dikembangkan menjadi sentra perkebunan rakyat terutama kelapa sawit. Pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Mukomuko dapat dilakukan secara terintegrasi dengan sentra-sentra perkebunan di sekitarnya seperti Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Bengkulu.

**d. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pengembangan komoditi hortikultura. Dengan telah ditetapkannya daerah ini sebagai kawasan agropolitan sayuran dataran tinggi, Kabupaten Rejang Lebong memainkan peran yang strategis dalam menghasilkan PAD melalui sub sektor hortikultura, pembangunan sub sektor hortikultura di daerah ini dapat lebih dititikberatkan pada skala agribisnis agar nilai tambah yang diperoleh masyarakat dan daerah semakin meningkat.

**e. Kabupaten Lebong**

Kabupaten Lebong memiliki karakteristik wilayah yang khas karena sebagian besar wilayahnya merupakan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam. Oleh sebab itu, Kabupaten Lebong telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Pembangunan sektor-sektor yang ada di daerah ini harus mengacu pada prinsip-prinsip konservasi dengan segala rambu-rambu yang ada. Kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah perlu dirancang sedemikian rupa agar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetap dapat dicapai tanpa harus bertentangan, bahkan saling mendukung dengan kegiatan konservasi.

**f. Kabupaten Kepahiang**

Kabupaten Kepahiang memiliki potensi agrowisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat dan daerah. Letak geografis sub-wilayah ini sangat strategis karena merupakan persimpangan dari jalur menuju Kota Bengkulu, lintas Sumatera melalui Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam. Posisi yang demikian dapat dimanfaatkan untuk menjadikan Kepahiang sebagai simpul pariwisata bagi objek-objek wisata yang tersebar di sub-wilayah sekitarnya, baik dalam wilayah Provinsi Bengkulu maupun Provinsi tetangga, dengan menggunakan pola regional manajemen.

**g. Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berperan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis perkebunan dan tanaman bahan pangan. Beberapa komoditi perkebunan yang memiliki potensi tinggi adalah kelapa dan kelapa sawit. Sementara tanaman bahan pangan seperti padi dan jagung telah ditetapkan pemerintah setempat sebagai komoditi unggulan, yang diintegrasikan dengan ternak sapi, dalam program agropolitan. Sektor jasa dapat pula dikembangkan untuk

menjadi penghubung dengan jaringan pasar di Lampung dan Pulau Jawa melalui jalur transportasi lintas barat

**h. Kabupaten Seluma**

Kabupaten Seluma memiliki beberapa sentra produksi palawija terutama jagung yang berpotensi untuk dikembangkan pada skala agribisnis dan agro industri. Industri pakan ternak dengan bahan baku jagung dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pakan ternak di Provinsi Bengkulu dan bahkan dijual keluar provinsi. Sub sektor perkebunan, terutama karet dan kelapa sawit, merupakan andalan daerah ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

**i. Kabupaten Kaur**

Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang sangat tinggi sehingga dapat dikembangkan pada skala agribisnis dan industri. Perencanaan pengembangan industri perikanan laut di Kabupaten Kaur sudah dirintis sejak tahun 1996 melalui program Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) perikanan tangkap. Daerah ini dapat juga berperan dalam pembangunan Provinsi Bengkulu melalui pengembangan sub sektor perkebunan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan pada RPJMD ke- 4 yaitu RPJM ke-4 ( 2021-2026) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3 ,RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil, demokratis bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertakwa serta perekonomian kokoh, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, unggul dan bertakwa serta berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh seperti :

- a. mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan

- b. meningkatnya kemampuan Iptek;
- c. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
- d. meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak
- e. dan terwujudnya kesetaraan gender
- f. bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Sumber daya manusia Provinsi Bengkulu yang unggul dan bertakwa adalah sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mitigasi bencana untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan peningkatan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang handal; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang

dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis dalam mempertimbangkan sumber daya, kondisi situasi saat ini, dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan

kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu.

<b>Misi ke-1</b>	:	<b>Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif</b>
Tujuan	:	Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran ke-1	:	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah
Sasaran ke-2	:	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan terhadap perekonomian daerah
Strategi ke-1	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan IKM</li> <li>- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri</li> <li>- Pengembangan inovasi teknologi produksi</li> <li>- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk</li> <li>- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan sedang besar</li> </ul>
Strategi ke-2	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga stabilisasi harga</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya sains</li> <li>- Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk</li> <li>- Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);</li> </ul>
Arah Kebijakan ke-1	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dukungan penguatan SDM</li> <li>- Peningkatan daya saing produk industri</li> <li>- Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi</li> <li>- Pengembangan wilayah pertumbuhan industri</li> <li>- Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> </ul>

Arah Kebijakan ke-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan operasi pasara dan pelaksanaan pasar murah</li> <li>- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online</li> <li>- Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah</li> </ul>
---------------------	---

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar pada tabel diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi otonomi daerah.

b. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

c. Aspek Teknologi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

d. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektorsektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah

e. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

### 3.3 Rencana Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Telahaan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah “**BENGGULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT**”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah

- (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.
- (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.
- (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu

***“Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”.***

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas

- (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing
- (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi.

### 3.3.2 Telahaan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Industri

- Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi  
Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri  
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
  - 1) Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
  - 2) Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
  - 3) Pembangunan Kawasan Industri; dan
  - 4) Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah
- Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.
- Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri.

- Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilir isasi industri berbasis SDA.
- Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri  
 Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:
  - 1) Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
  - 2) Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
  - 3) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

  - 1) Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
  - 2) Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
  - 3) Meningkatkan kontribusi HAKI
- Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
  - 1) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;

- 2) Pengembangan sentra Industri kreatif;
  - 3) Pelatihan teknologi dan desain;
  - 4) Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
  - 5) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif
- Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
    - 1) Pemberian pinjaman;
    - 2) Hibah; dan/atau
    - 3) Penyertaan modal.
  - Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
  - Sistem informasi industri nasional Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
    - 1) Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI

- 2) Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
- 3) Data SINA paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.

- Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah  
Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan
- 2) Pemberian fasilitas
- 3) Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

- Fasilitasi Rekomendasi Perizinan  
Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:
  - 1) Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
  - 2) Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
  - 3) Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi..
- Peningkatan penanaman modal di bidang industri  
Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.
- Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri  
Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada

perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- 1) Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal
- 2) Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- 3) Mengembangkan SDM Industri
- 4) Berorientasi ekspor
- 5) Melakukan upaya industri hijau
- 6) Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 maka visi pembangunan industri nasional yaitu “Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan” dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh

dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;

3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Dengan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.
- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

2. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.
- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

## 2. Bidang Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- c. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

- a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
- b. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
- d. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- e. Pengelolaan impor
- f. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
- g. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

### 1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
  - b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
  - c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:  
 Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
  - b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok  
 Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
  - b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
  - c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok
- .Berdasarkan sasaran pembangunan industri nasional 2015 – 2035 , maka sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 guna tercapainya visi misi dan tujuan membangun Bengkulu yang sejahtera dan berdaya saing adalah:
- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2038 sehingga kontribusi industri dalam PDB mencapai 20,22%.

- 2) Tercapainya percepatan pertumbuhan industri di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
- 3) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam lokal dan didukung oleh fasilitasi industri jasa
- 4) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten, pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 6) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi.

Penahapan capaian pembangunan industri unggulan dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri Provinsi Bengkulu diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap I (2018 – 2022)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan IKM dan sentra IKM, meningkatkan penguasaan teknologi, memperkuat industri hulu agro, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, perencanaan pengembangan kawasan industri, membangun *brand market* di tingkat nasional.

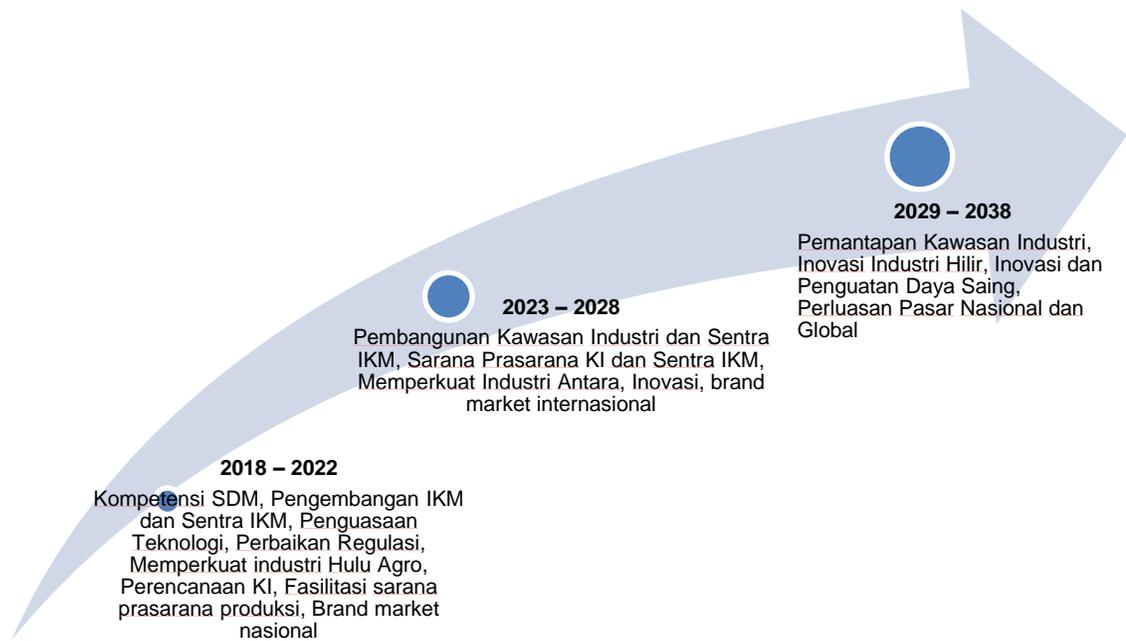
2) Tahap II (2023 – 2028)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat struktur industri yang didukung dengan sumber daya manusia industri yang memiliki kompetensi pada industri yang memiliki keunggulan komparatif guna mencapai keunggulan kompetitif, pembangunan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, membangun *brand market* internasional.

3) Tahap III (2029 – 2038)

Arah pembangunan industri Provinsi Bengkulu pada tahap ini untuk perluasan pasar produk unggulan Provinsi Bengkulu di tingkat nasional dan global dan terus mengembangkan inovasi dan teknologi serta pengembangan kawasan industri.

Secara sederhana tahapan pembangunan industri Provinsi Bengkulu tahun 2018 – 2038 diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada potensi produksi primer dari sumber daya lokal dan sumbangsihnya terhadap nilai PDRB daerah Provinsi Bengkulu selama ini.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri
- 2) Memperkuat keterkaitan agro-hulu dan percepatan penguatan prasarana agro-processing produk sekunder atau produk akhir berbasis keanekaragaman sumber daya lokal
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif, regulasi yang efektif dan efisien
- 4) Penguatan ekosistem bisnis bagi pelaku industri melalui fasilitasi baik *e-promotion* dan *e-commerce* maupun *direct promotion* untuk perluasan pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Memfasilitasi *start up* melalui inkubator bisnis untuk penguatan kompetensi sumber daya pelaku industri dan *scale up* jaringan bisnis (*network*) dengan stakeholders guna penguatan kemandirian entrepreneur.

- 6) Fasilitasi penguatan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk industri.

### 3.4 Uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, dan RKPD awal tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Rincian Program dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ada 2 yaitu Pendanaan Untuk Dinas dan UPTD adalah sebagai berikut:

#### a. Program pada Dinas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
8. Program Pengembangan Ekspor

#### b. Program pada UPTD PPMB:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

TABEL 3.1

Rumusan Rencana Kerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2024 Dan Perkiraan Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

OPD: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Anggaran 2024		Perkiraan Maju Rencana Anggaran Tahun 2025		Unit Kerja	Lokasi	Misi Ke dan Program Unggulan Ke
					Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2		3	4	7	8	9	10	14	15	16
3.30/3.31	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH					13.731.347.897		15.000.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2,4	625.000.000	2,6	645.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Peningkatan Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	6.000	625.000.000	6.500	645.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Sesuai Standar	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Standar	Persen	25	100.000.000	25	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Program Prioritas
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sarana Pusat Distribusi Provinsi yang dibangun dan di Kelola	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi yang dibangun dan di Kelola	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Program Prioritas
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	Perindag	Bengkulu	Program Prioritas
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	Perindag	Bengkulu	Program Prioritas
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	4	290.000.000	3,5	285.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Infomasi harga dan stok Bapokting	Jumlah infomasi harga dan stok Bapokting	Dokumen	12	265.000.000	12	225.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02.01	Pemantaua Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang pentingf pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	10	225.000.000	10	185.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Infomasi Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah infomasi Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Laporan	1	25.000.000	1	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	1	25.000.000	1	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Persentase Penyelesaian Perselisihan Antara Konsumen dan Produsen	Persentase Penyelesaian Perselisihan Antara Konsumen dan Produsen	Persen	46	60.000.000	48	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah	10	60.000.000	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	10	60.000.000	10	60.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
B.2	MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Persentase dan Nilai Ekspor	Nilai Ekspor	US \$ (Juta)	275	175.000.000	310	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	12,2		12,7		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Jumlah Komuditi Ekspor	Jumlah Komuditi Ekspor	Produk	8	175.000.000	9	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Tertelaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang	Dokumen	4	175.000.000	4	200.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Tertelaksananya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2	125.000.000	6	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Tertelaksananya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	50.000.000	2	50.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	0	-	2	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	0	-	20	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31	TUJUAN 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Persen	3,4	12.922.347.897	3,6	14.355.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
A.2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	AKUNTABILITAS KINERJA OPD	NILAI SAKIP	Nilai	BB	12.072.347.897	A	13.105.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD		NILAI SAKIP						Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bidang Perindustrian dan Perdagangan yang di laksanakan	Persentase Pogram Penunjang yang di laksanakan	Persen	100	12.072.347.897	100	13.105.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	14	175.000.000	14	160.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	100.000.000	10	130.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	75.000.000	4	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.31.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>14</b>	<b>9.978.461.897</b>	<b>14</b>	<b>10.518.500.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Orang / Bulan</b>	12	9.916.879.897	12	10.370.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	61.582.000	12	148.500.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03	<b>Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>38.850.000</b>	<b>1</b>	<b>17.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	38.850.000	1	17.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>35.000.000</b>	<b>2</b>	<b>110.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ASN	Paket	0	-	2	75.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	35.000.000	5	35.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>8</b>	<b>415.000.000</b>	<b>8</b>	<b>675.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	30.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	70.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	35.000.000	1	55.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	90.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	30.000.000	1	80.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	20.000.000	1	60.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	200.000.000	85	290.000.000	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.31.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0		<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.31.01.1.07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jenis	4	50.000.000	4	96.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50.000.000	3	66.500.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2		2	30.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	4	1.235.036.000	4	1.190.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	12	15.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	210.000.000	12	250.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	20.000.000	3	55.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35	995.036.000	35	870.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	30	145.000.000	30	180.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	110.000.000	9	80.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	25.000.000	20	25.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	1	75.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3,31	SASARAN 1 : MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI	NILAI PRODUKSI INDUSTRI	Nilai Produksi Industri Besar	Rupiah (Milyar)	11.700		12.200	1.250.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rupiah (Milyar)	250	850.000.000	300,00		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	11,1	725.000.000	16,6	1.050.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	5		5,5		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.10.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	1	725.000.000	1	1.050.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
			Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	120		140		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	100.000.000	3	450.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	25.000.000	3	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	600.000.000	5	500.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tersedianya Dokumen Nilai Realisasi Investasi Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	126,00	50.000.000	210,00	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Perizinaan Usaha dan Pengawasan	Dokumen	2	50.000.000	1	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.03.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2	50.000.000	2	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Peningkatan Persentase Perusahaan Industri Dalam Sistem Informasi Industri Nasional	dan Sinkronisasi Pengawasan	Persen	39	75.000.000	55	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	3	75.000.000	1	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	3	50.000.000	3	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	25.000.000	3	100.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( UPTD PPMB )	Terlaksananya Pelayanan Administrasi umum yang di UPTD PPMB	Jumlah Teknis Pelayanan Administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan	3	184.000.000	3	158.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	2	25.000.000			Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1

## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

3.30.01.1.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>44.000.000</b>	<b>4</b>	<b>56.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	4	15.000.000	4	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.000.000	2	9.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.000.000	2	7.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.000.000	5	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2</b>	<b>47.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	5.000.000	2	7.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	-	3	40.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>4</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000	4	15.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang</b>	<b>Persen</b>	<b>87</b>	<b>100.000.000</b>	<b>90</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.06.1.02	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk</b>	<b>Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk</b>	<b>Produk</b>	<b>6</b>	<b>100.000.000</b>	<b>7</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Perindag</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>Misi Ke 1</b>
3.30.06.1.02.01	Pemantaun Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/Persyaratan Teknis yang Berlaku	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Produk	5	40.000.000	6	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	5	20.000.000	6	20.000.000	Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1	40.000.000	10		Perindag	Bengkulu	Misi Ke 1
<b>Belanja Pegawai</b>						<b>9.916.879.897</b>		<b>10.370.000.000</b>			
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>3.814.468.000</b>		<b>4.630.000.000</b>			
<b>Jumlah</b>						<b>13.731.347.897</b>		<b>15.000.000.000</b>			

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dilakukan untuk menindaklanjuti Review pada RPJMD, Renstra Dinas, dan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, serta RKPD Awal tahun 2024 dan Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini disusun, saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Renja ini untuk masa-masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu

**Ir. YENITA SYAIFUL, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640601 199103 2 002